

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Sektor ekonomi di Indonesia sebagian besar didukung oleh sektor UMKM. Dalam perekonomian Indonesia UMKM berperan sebagai penyumbang pendapatan yang lumayan besar dan mampu menyerap tenaga kerja yang besar. Menurut Ali Sakti dalam artikelnya menjelaskan bahwa sektor UMKM memiliki jumlah pelaku usaha yang mencapai 51,3 juta unit usaha dan menyerap tenaga kerja 90,9% serta kontribusinya terhadap PDB sebesar 2.609 triliun sekitar 55,6%.<sup>1</sup>

Keunggulan UMKM sebagai sektor domestik yang mampu menggerakkan perekonomian nasional adalah karena ketergantungannya yang kuat terhadap muatan lokal. Unit usaha UMKM menggunakan sumber daya dalam negeri baik sumber daya manusia, bahan baku dan peralatan sehingga UMKM tidak tergantung pada ekspor. Selain itu, hasil produksi sektor UMKM lebih ditujukan untuk memenuhi pangsa pasar dalam negeri sehingga tidak tergantung kepada kondisi perekonomian negara lain. Oleh karena itu, dari sudut perekonomian nasional sektor inilah yang paling tahan terhadap ancaman krisis global beberapa waktu yang lalu.

Disamping itu, sektor ini mengalami kendala baik dalam masalah permodalan maupun untuk mengembangkan usahanya. Dari sisi pembiayaan,

---

<sup>1</sup> Ali Sakti, *Peran Perbankan Syariah dalam Pemberdayaan UMKM*, artikel diakses pada tanggal 14 Januari 2016 dari <http://www.pkesinteraktif.com/edukasi/opini/2418-peran-perbankan-syariah-dalam-pemberdayaan-umkm-html>.

masih banyak pelaku UMKM yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan akses pembiayaan dari bank, baik karena kendala teknis, misalnya tidak mempunyai/tidak cukup agunan, maupun kendala non teknis, misalnya keterbatasan akses informasi ke perbankan. Dari sisi pengembangan usaha, pelaku UMKM masih memiliki keterbatasan informasi mengenai pola pembiayaan untuk komoditas tertentu.<sup>2</sup>

Dalam pembicaraan sehari-hari, bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan giro, tabungan dan deposito. Kemudian bank juga dikenal sebagai tempat untuk meminjam uang bagi masyarakat yang membutuhkannya. Di samping itu, bank juga dikenal sebagai tempat untuk menukar uang dan setoran seperti pembayaran listrik, telepon, air, pajak dan pembayaran lainnya. Menurut undang-undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan Bank adalah:

*“badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.*<sup>3</sup>

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Bank Syariah, yang dimaksud Bank Syariah adalah *bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah*.<sup>4</sup> Dengan demikian, dapat ditarik definisi umum bahwa Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang

---

<sup>2</sup> Bank Indonesia, *Kelayakan Usaha, Mikro Kecil dan Menengah*, diakses pada tanggal 27 Desember 2015 dari <http://www.bi.go.id/id/umkm/kelayakan/contents/default.aspx>

<sup>3</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

<sup>4</sup> Nur Rianto Ali, *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis Praktis*, cet.. ke-1, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hlm. 98

menjadi perantara (*intermediary*) dalam penghimpunan dana masyarakat serta penyaluran pembiayaan kepada masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Di Indonesia, perkembangan Lembaga Keuangan Syariah dari tahun ke tahun semakin pesat. Hal ini bisa dilihat dari jumlah Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang telah mencapai puluhan serta kantor layanan yang mencapai ratusan unit. Bahkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) sebagai bagian dari lembaga perbankan syariah juga mengalami perkembangan yang cukup menggembirakan. Berdasarkan data dalam statistik perbankan syariah, jumlah kantor BPRS mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 1.1 Jaringan Kantor Bank Pembiayaan Rakyat Syariah**

| Jaringan Kantor Bank Pembiayaan Rakyat Syariah* |             |             |             |             |             |             |
|-------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Bank Pembiayaan Rakyat Syariah</b>           | <b>2009</b> | <b>2010</b> | <b>2011</b> | <b>2012</b> | <b>2013</b> | <b>2014</b> |
| Jumlah Bank                                     | 138         | 150         | 155         | 158         | 163         | 163         |
| Jumlah Kantor                                   | 225         | 286         | 364         | 401         | 402         | 439         |
| Total Kantor                                    | 363         | 436         | 519         | 559         | 565         | 602         |

Sumber: Statistik Perbankan Syariah April 2015.

\*Data sudah diolah

Salah satu bank syariah yang menawarkan produk pembiayaan di sektor UMKM yaitu BPRS Bhakti Sumekar. Bank yang merupakan akuisisi dari PT. BPR Dana Merapi yang berdomisili di Sidoarjo dan kemudian

direlokasi ke Kabupaten Sumenep ini merupakan bentuk lembaga keuangan mikro yang sesuai dengan kondisi masyarakat daerah Sumenep.<sup>5</sup> Meskipun tergolong lembaga keuangan mikro, dilihat dari aset yang dimiliki BPRS Bhakti Sumekar mengalami pertumbuhan yang baik. Selama tahun 2014 aset BPRS Bhakti Sumekar mengalami kenaikan sebesar 409 milyar dari 317 milyar, sedangkan pembiayaan pertumbuhan kredit naik 21,96% dari 240 milyar menjadi 292,87 milyar.<sup>6</sup>

Salah satu misi yang diusung oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bhakti Sumekar Kabupaten Sumenep yaitu membantu melaksanakan pemberdayaan pengusaha ekonomi kecil dan menengah. Bank BPRS Bhakti Sumekar tentu bersikap tanggap melihat geliat ekonomi mikro dan kreativitas ekonomi warga. Seperti memberikan suntikan modal terhadap industri dan kerajinan masyarakat yang mendapat kesulitan di bidang permodalan.

Oleh karena itu, BPRS Bhakti Sumekar ini menawarkan produk pembiayaan UMKM yaitu untuk memberikan bantuan pinjaman dana berupa pembiayaan UMKM yang diberikan untuk modal kerja atau investasi bagi perorangan yang memiliki usaha kecil, menengah dengan akad jual beli (*Murābahah*) atau bagi hasil (*Mudhārabah*).

Perhatian Bank BPRS Bhakti Sumekar terhadap UMKM bukan hanya sekedar wacana belaka. Terbukti telah banyak usaha-usaha kecil masyarakat yang mendapatkan bantuan dan menjadi binaan yang terus dikontrol jalannya usahanya. Salah satu usaha masyarakat yang mendapatkan bantuan modal

---

<sup>5</sup> Company Profile PT. Bhakti Sumekar Sumenep, diakses pada tanggal 26 Desember 2015 dari <http://www.bhaktisumekar.co.id/compone.profile>.

<sup>6</sup> <http://www.suaraindonesia-news.com> diakses pada tanggal 17 November 2015

dari BPRS Bhakti Sumekar adalah usaha di bidang batik tulis pada Sentra Batik Tulis Melati.

Bank syariah sebagai lembaga intermediasi keuangan yang menghimpun dana (*funding*) dari masyarakat dan menyalurkan dana (*lending*) kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan sangat memperhatikan proses pemberian kredit/pembiayaan kepada masyarakat. Istilah pembiayaan pada perbankan syariah memiliki konsep serupa dengan istilah kredit di perbankan konvensional. Bank syariah, termasuk diantaranya BPRS Bhakti Sumekar, dalam menyalurkan pembiayaan juga membutuhkan tahap-tahap dan analisis yang matang terhadap calon debitur. Hal tersebut dilakukan untuk memberikan keputusan apakah calon debitur yang mengajukan permohonan pembiayaan layak mendapatkan pembiayaan atau tidak. Tahap terpenting dalam pembiayaan yaitu analisis kelayakan pembiayaan yang dapat meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah. Dalam penelitian ini, analisis kelayakan pembiayaan yang digunakan untuk menilai layak tidaknya pembiayaan calon debitur yaitu menggunakan metode analisis dengan prinsip 7 P yaitu *Personality, Purpose, Party, Payment, Prospect, Profitability* dan *Protection*.

Tujuan utama analisis kredit yang dilakukan oleh sebuah perbankan adalah untuk menilai kemampuan dan kesediaan calon debitur untuk memenuhi kewajibannya atas dana yang dipinjamnya, sehingga dalam menyalurkan pembiayaan perbankan dapat meminimalisir risiko terjadinya pembiayaan bermasalah. Oleh karena itu dengan adanya analisis kelayakan

pembiayaan tersebut diharapkan akan terciptanya *win-win solution* dan terhindar dari risiko kerugian kedua belah pihak.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengkaji mengenai “Pengaruh Penerapan Prinsip 7P Terhadap Kelayakan Pembiayaan UMKM Di BPRS Bhakti Sumekar”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

- 1.2.1 Bagaimana penerapan Prinsip 7P (*Personality, Purpose, Party, Payment, Prospect, Profitability* dan *Protection*) dalam menganalisis kelayakan pembiayaan UMKM pada BPRS Bhakti Sumekar?
- 1.2.2 Bagaimana pengaruh penerapan Prinsip 7P (*Personality, Purpose, Party, Payment, Prospect, Profitability* dan *Protection*) terhadap kelayakan pembiayaan UMKM pada BPRS Bhakti Sumekar?

## **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Selain sebagai syarat untuk menyelesaikan studi program Sarjana 1 (S1) tujuan dan manfaat dari penelitian ini adalah:

- 1.3.1 Tujuan Penelitian
  - 1.3.1.1 Untuk mengetahui penerapan Prinsip 7P (*Personality, Purpose, Party, Payment, Prospect, Profitability* dan *Protection*) dalam menganalisis kelayakan pembiayaan UMKM di BPRS Bhakti sumekar.

1.3.1.2 Untuk memahami pengaruh penerapan Prinsip 7P (*Personality, Purpose, Party, Payment, Prospect, Profitability* dan *Protection*) terhadap kelayakan pembiayaan UMKM di BPRS Bhakti Sumekar.

### 1.3.2 Manfaat Penelitian

#### 1.3.2.1 Bagi Manajemen PT BPRS Bhakti Sumekar

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sarana sumbangan pikiran dalam menentukan kebijaksanaan pembiayaan yang diberikan kepada nasabah agar dalam memberikan pembiayaan tidak salah sasaran sehingga dapat terhindar dari terjadinya resiko pembiayaan bermasalah/kredit macet..

#### 1.3.2.2 Bagi Pembaca/ Mahasiswa

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat dijadikan informasi untuk menambah referensi bagi peneliti baik yang akan melakukan penelitian, maupun yang sedang melakukan penelitian.

#### 1.3.2.3 Bagi Debitur dan Calon Debitur

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat digunakan sebagai sumbangan wawasan dalam mengambil pembiayaan.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan pemahaman dan memperjelas arah pembahasan maka penulisan skripsi ini disistematisasikan menjadi lima bab dengan uraian kalimat sebagai berikut:

- Bab I           Merupakan bab pendahuluan. Dalam bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan
- Bab II           Merupakan bab Landasan teori yang menguraikan tinjauan teori yang dipergunakan sebagai dasar dalam penelitian, kajian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis.
- Bab III          Merupakan bab yang membahas metode penelitian yang digunakan oleh peneliti.
- Bab IV          Merupakan bab pembahasan yang menguraikan tentang deskripsi objek penelitian, hasil analisa perhitungan data, pembahasan tentang hasil penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan dalam rumusan masalah.
- Bab V          Merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.